



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **500495**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.860.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 4600 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 190.000.000**

1. LAINNYA, VIAR TOSSA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTRA 70 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC NOVA Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



5. MOTOR, VESPA LX 125 I-GET Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
39.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.128.000.000
III. HUTANG	Rp.	290.668.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.837.332.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.